

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
(P-RENJA)
KECAMATAN TRAWAS KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN TRAWAS
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa bersyukur kehadiran Allah SWT, marilah kita bersama-sama tetap melaksanakan amanah dalam bidang tugas kita masing-masing bagi kepentingan negara, nusa dan bangsa yang kita cintai ini.

Sebagai tindaklanjut dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dan dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut di atas, kami telah berusaha menyajikan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kantor Kecamatan Trawas Tahun Anggaran 2023. Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kantor Kecamatan Trawas Tahun 2023 ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Perencanaan Strategis (Renstra), yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) ini dan semoga Allah SWT. senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, Juli 2023
CAMAT TRAWAS

SUGONDO, S.Sos., MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19670110 199003 1 007

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023.....	6
BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	9
BAB IV Penutup	13

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 Kecamatan Trawas merupakan dokumen perencanaan yang mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah Perubahan (RKPD) Tahun 2023 Kabupaten Mojokerto yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan di Kabupaten Mojokerto berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan.

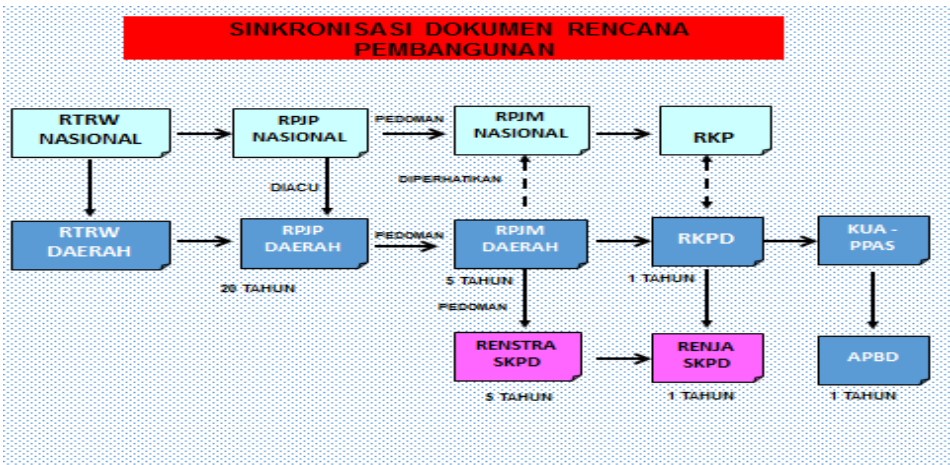
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 Kecamatan Trawas yang selanjutnya disingkat dengan Perubahan Renja Kecamatan Trawas adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Trawas Tahun 2021 – 2026.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Rencana Kerja merupakan alat untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah yang pencapaian targetnya sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan harus dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 1.1

Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja Perangkat Daerah. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja Perangkat Daerah, orientasi mengenai RKPD dan Renja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan tahap awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah,

selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

Berdasarkan hal tersebut, maka Kecamatan Trawas sebagai Organisasi Perangkat Daerah menyusun Perubahan Rencana Kerja tahun 2023, yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Perangkat Daerah serta untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi , Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2005 – 2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
27. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 44 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
28. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 4);
29. Peraturan daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 1);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026;
31. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;
32. Surat Keputusan Camat Trawas Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tim Penyusunan Renstra Kecamatan Trawas 2021-2026

33. Surat Keputusan Camat Trawas Nomor 24 Tahun 2023 tentang Tim
Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Trawas Tahun 2023

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja adalah untuk merumuskan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Trawas dalam periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah.

b. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah :

1. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 tahun yang tersusun dalam rencana.
2. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program / kegiatan selama 1 tahun oleh Perangkat Daerah.
3. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil
4. Langkah-langkah / kebijakan tugas-tugas sesuai dengan kewenangannya.
5. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 Kecamatan Trawas ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Trawas. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renja ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Sistimatika penulisan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang proses penyusunan P- Renja Perangkat Daerah. keterkaitan antara P - Renja Perangkat Daerah dengan dokumen P- RKPD. Renstra Perangkat Daerah. dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota. serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang. peraturan pemerintah. peraturan daerah. dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK. kewenangan Perangkat Daerah. serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah. serta susunan garis besar isi dokumen

Bab II evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun berjalan dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1). mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

Tabel yang perlu disajikan adalah tabel E. 81 dan Tabel T-C. 29

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM. maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji. disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD. serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel T-C. 30

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel T-C. 31

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Uraian hasil kajian terhadap program/ kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan. baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan OPD.dan langsung ditujukan kepada OPD.berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang (bila sudah dilakukan) dan usulan dari masyarakat yang ada di SIPD untuk dilakukan pada P-APBD
Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel T-C. 32

Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel sesuai tabel yang ada pada Bab 4 renja

Bab IV Penutup

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian. baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan
- c. Rencana tindak lanjut.
- d. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen. nama OPD dan nama dan tandatangan kepala OPD. serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Trawas bermaksud untuk mengetahui sejauh mana capaian pelaksanaan Renja tahun 2023 sampai pada Triwulan II. Tujuan Evaluasi hasil Renja tahun 2023 yaitu untuk menilai dan memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan dalam Renja tahun 2023 sampai dengan triwulan II dan sasaran Renstra dapat dicapai dalam upaya mendukung pencapaian sasaran pembangunan tahun 2023.

Dalam pelaksanaannya terjadi perubahan pada beberapa indikator dan target program dan kegiatan Kecamatan Trawas tahun 2023. beberapa hal yang mendasari perubahan tersebut antara lain: (1) Capaian Target Kinerja dan Keuangan sampai dengan Triwulan II; (2) Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sampai dengan Triwulan II/Semester I.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Capaian target kinerja dan keuangan Kecamatan Trawas selama Triwulan II sudah menampakkan kinerja yang diharapkan sesuai dengan progres target yang sudah ditentukan ,hal ini dikarenakan pelaksanaan Kegiatan sudah sampai pada Triwulan II . Ada beberapa Program/Kegiatan yang masih belum menampakkan hasil Capaian Kinerja.

1. Nilai IKM Kecamatan Trawas

Nilai IKM Kecamatan Trawas baru bisa dihitung di akhir Tahun Kegiatan

2. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Hal ini dikarenakan penilaian SAKIP masih belum terlaksana

3. IP ASN

Hal ini dikarenakan proses perhitungan Nilai IP ASN Kecamatan Trawas masih belum keluar.

Tapi ada juga yang memenuhi bahkan melebihi target kinerja yang sudah ditentukan.. seperti yang tercantum pada Tabel E.81 dan Tabel TC.29 dibawah ini sekaligus Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya. terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan. kemudian Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah serta Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. seperti yang tercantum pada Tabel dibawah ini.

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkungan Kabupaten
Kecamatan Trawas
2023

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode renstra perangkat daerah)		Realisasi capaian kinerja rentra perangkat daerah sampai dengan renja perangkat daerah tahun lalu (2022)		Target Kinerja dan anggaran renja pada tahun berjalan (2022) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (akhir tahun pelaksanaan renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran renstra perangkat daerah s/d 2022 (%)		Per mas alah an
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
1	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah		Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah(nilai)					62,00																
2		[PROGRAM] 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah(nilai)	0,00	3.471.050.122	0,00	1.096.295.914	81,60	0,00	0,00	484.080.516	0,00	612.215.398	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096.295.914	0,00	0,00	0,00	0,00	
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan(%)	0,00	0,00	0,00	49.871.738	82,00	115.800.000	0,00	21.993.700	43,07	27.878.038	0,00	0,00	0,00	0,00	43,07	49.871.738	0,00	0,00	0,00	0,00	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	33.000.000	3,00	8.193.700,00	3,00	7.178.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	15.371.738	0,00	0,00	0,00	0,00	

			Disediakan(Laporan)																				
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	82.800.000	3,0 0	13.800.000,00	3,00	20.700.000,0 0	0, 00	0,0 0	0,0 0	0,0 0	6,00	34.500.000	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan(%)	0,00	0,00	0,00	81.254.500,00	82,00	179.850.000	24, 90	46.137.200	24,90	35.117.300	0, 00	0,0 0	0,0 0	0,0 0	49,8 0	81.254.500	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	9.725.000	2,0 0	3.802.000,00	0,00	1.146.800,00	0, 00	0,0 0	0,0 0	0,0 0	2,00	4.948.800	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	36.000.000	3,0 0	6.100.000,00	3,00	2.800.000,00	0, 00	0,0 0	0,0 0	0,0 0	6,00	8.900.000	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	40.000.000	3,0 0	6.209.500,00	3,00	11.960.000,0 0	0, 00	0,0 0	0,0 0	0,0 0	6,00	18.169.500	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	24.000.000	3,0 0	17.738.500,00	3,00	1.394.000,00	0, 00	0,0 0	0,0 0	0,0 0	6,00	19.132.500	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	56.525.000	0,0 0	1.747.200,00	3,00	16.750.000,0 0	0, 00	0,0 0	0,0 0	0,0 0	3,00	18.497.200	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan(Dokumen)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3.600.000	1,0 0	540.000,00	0,00	1.066.500,00	0, 00	0,0 0	0,0 0	0,0 0	1,00	1.606.500	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(Paket)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	10.000.000	1,0 0	10.000.000,00	0,00	0,00	0, 00	0,0 0	0,0 0	0,0 0	1,00	10.000.000	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0

		n Bangunan Kantor																						
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan(%)	0,00	0,00	0,00	17.550.000,00	82,00	30.500.000	0,00	0,00	57,54	17.550.000	0,00	0,00	0,00	0,00	57,54	17.550.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan(Paket)	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	30.500.000	0,00	0,00	3,00	17.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	17.550.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah(%)	0,00	0,00	0,00	892.639.076,00	82,00	2.135.051.000	0,00	390.869.016	40,25	501.770.060	0,00	0,00	0,00	0,00	40,25	892.639.076	0,00	0,00	0,00	0,00	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	2.135.051.000	0,00	390.869.016,00	15,00	501.770.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	892.639.076	0,00	0,00	0,00	0,00	
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah(indeks)	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	70,00	17.000.000	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan(Orang)	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	17.000.000	0,00	0,00	15,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	17.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik(%)	0,00	0,00	0,00	33.190.600,00	82,00	126.249.000	0,00	21.630.600,00	80,95	11.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,95	33.190.600	0,00	0,00	0,00	0,00	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	14.950.000	0,00	2.110.000,00	2,00	1.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	3.570.000	0,00	0,00	0,00	0,00	

		atau Bangunan Lainnya	Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)																					
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	70.174.000	3,00	7.220.600,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	12.020.600	0,00	0,00	0,00	0,00	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya(Unit)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	41.125.000	1,00	12.300.000,00	0,00	5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	17.600.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai(%)	0,00	0,00	0,00	4.790.000,00	82,00	15.000.000	0,00	3.450.000,00	0,00	1.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.790.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	7.500.000	6,00	1.200.000,00	5,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	2.040.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	7.500.000	2,00	2.250.000,00	1,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2.750.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal		IKM Kecamatan(%)	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
2		[PROGRAM] 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan(%)	0,00	60.000.000,00	0,00	5.821.000,00	82,00	37.000.000	0,00	581.000,00	56,26	5.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,26	5.821.000	0,00	0,00	0,00	0,00	

3		[KEGIATAN] 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan(pelaya nan)	0,00	0,00	0,00	5.821.000,00	1.500, 00	37.000.000	0,0 0	581.000,00	844,0 0	5.240.000,00	0, 00	0,0 0	0,0 0	0,0 0	844, 00	5.821.000	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan(Lapo ran)	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	37.000.000	3,0 0	581.000,00	6,00	5.240.000,00	0, 00	0,0 0	0,0 0	0,0 0	9,00	5.821.000	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	
2		[PROGRAM] 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti(%)	0,00	420.000.000,00	0,00	95.648.500,00	82,00	318.500.000	19, 35	62.709.500,00	38,71	32.939.000,0 0	0, 00	0,0 0	0,0 0	0,0 0	58,0 6	95.648.500	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	
3		[KEGIATAN] 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat(Fasilit asi)	0,00	0,00	0,00	95.648.500,00	31,00	318.500.000	6,0 0	62.709.500,00	12,00	32.939.000,0 0	0, 00	0,0 0	0,0 0	0,0 0	18,0 0	95.648.500	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum(Dokumen)	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	62.400.000	0,0 0	7.717.500,00	3,00	10.200.000,0 0	0, 00	0,0 0	0,0 0	0,0 0	3,00	17.917.500	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa(Dokumen)	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	55.800.000	0,0 0	6.968.000,00	4,00	5.508.000,00	0, 00	0,0 0	0,0 0	0,0 0	4,00	12.476.000	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	

4		[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa(Dokumen)	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	43.300.000	3,0 0	17.342.000,00	2,00	9.268.000,00	0, 00	0,0 0	0,0 0	0,0 0	5,00	26.610.000	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.12 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan(D okumen)	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	157.000.000	3,0 0	30.682.000,00	3,00	7.963.000,00	0, 00	0,0 0	0,0 0	0,0 0	6,00	38.645.000	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	
	[Target Capaian Sub Kegiatan]																	66.8 0 %						
	[Faktor Pendorong Keberhasila n Kinerja]	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan Target yang sudah ditetapkan																						
	[Faktor Penghamba t Pencapaian Kerja]	Nilai IP ASN , Nilai IKM dan Nilai SAKIP Kecamatan Trawas belum keluar																						
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya]	Kegiatan yang akan dilaksanakan tetap mengacu pada Time Schedule yang telah ditentukan																						
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya]																							

T.C 29

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kabupaten Mojokerto**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Trawas

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021(n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,60 (A)	n/a	n/a	n/a	n/a	81,60 (A)	0%	0%
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	82%	n/a	n/a	n/a	n/a	82%	63,93%	77,97%
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku	2 Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	2 Dokumen	1 dokumen	50%
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	21 Laporan	n/a	n/a	n/a	n/a	21 Laporan	10 dokumen	47,62%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	82%	n/a	n/a	n/a	n/a	82%	100,00%	121,95%
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan	15 Orang/Bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	15 Orang/Bulan	15 Orang/Bulan	100%
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	70	n/a	n/a	n/a	n/a	70	0	0%

7.01.01.2.05.02	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	22 Orang	n/a	n/a	n/a	n/a	22 Orang	22 Orang	100%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	82%	n/a	n/a	n/a	n/a	82%	69,64%	84,93%
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Paket	1 Paket	100%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	8 Paket	n/a	n/a	n/a	n/a	8 Paket	3 paket	37,50%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Paket	6 paket	50%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	n/a	n/a	n/a	n/a	2 Paket	2 Paket	100%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen					1 Dokumen	1 dokumen	100%
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 paket	n/a	n/a	n/a	n/a	12 paket	6 Paket	50%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Laporan	6 Laporan	50%
7.01.01.2.08	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan	82%	n/a	n/a	n/a	n/a	82%	42,85%	52,26%
7.01.01.2.08.02	Pengadaaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Paket	n/a	n/a	n/a	n/a	7 Paket	3 Paket	42,85%
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan	82%	n/a	n/a	n/a	n/a	82%	50%	60,97%

7.01.01.2.09	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Laporan	6 Laporan	50%
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Laporan	6 Laporan	50%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	82%	n/a	n/a	n/a	n/a	82%	77,76%	94,83%
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pmrliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	n/a	n/a	n/a	n/a	1 unit	1 Unit	100%
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	n/a	n/a	n/a	n/a	3 unit	3 Unit	100%
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 unit	n/a	n/a	n/a	n/a	6 unit	2 Unit	33,30%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	82%	n/a	n/a	n/a	n/a	82%	100%	121%
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	1500 pelayanan	n/a	n/a	n/a	n/a	1500 pelayanan	844 Pelayanan	56,26%
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	19 Laporan	n/a	n/a	n/a	n/a	19 Laporan	9 Laporan	47,36%
7.01.03	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	82%	n/a	n/a	n/a	n/a	82%	58,06%	70,80%

7.01.03.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat	31 fasilitasi	n/a	n/a	n/a	n/a	31 fasilitasi	18 Fasilitasi	58,06%
7.01.03.2.01.02		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	8 Dokumen	4 Dokumen	50%
7.01.03.2.01.03		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5 Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
7.01.04.2.01.01		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	5 Dokumen	3 Dokumen	60%
7.01.04.2.01.02		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	13 Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	13 Dokumen	6 Dokumen	46,15%

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Rencana Kerja Kecamatan Trawas sampai dengan Triwulan II pada tabel T-C.29. dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Realisasi Program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.

No	Program/Kegiatan	Indikator	Capaian Kinerja	
			Target	Realisasi
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,60	-
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	82%	56,26 %
3.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	82%	58,06%

Pada Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah Capaian Kinerja sampai Triwulan II masih 0 , hal ini dikarenakan Penilaian SAKIP Perangkat Daerah masih belum dilaksanakan.

Pada Indikator Persentase Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti sampai Triwulan II sudah terealisasi 58,06 % . Capaian Kinerja sudah bagus karena sudah melampaui 50 % dari target yang ditetapkan.

2. Realisasi Program / Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.

Semua Program belum ada yang memenuhi Target Kinerja dikarenakan pelaksanaan Kegiatan masih sampai di Triwulan II.

3. Realisasi Program / Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.

Semua Program belum ada yang memenuhi Target Kinerja yang direncanakan

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya kinerja Program /Kegiatan.

1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah belum tercapai dikarenakan belum terlaksananya Penilaian SAKIP Perangkat daerah.
2. Nilai IP ASN Kecamatan Trawas belum tercapai dikarenakan belum ada hasil perhitungan IP ASN
3. Nilai IKM Kecamatan Trawas belum dihitung dikarenakan perhitungan Nilai IKM dilaksanakan pada akhir Tahun Kegiatan.

5. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja Program /Kegiatan
Semua Program belum ada yang memenuhi Target Kinerja dikarenakan pelaksanaan kegiatan masih sampai Triwulan II.
6. Faktor-faktor penyebab melebihi target kinerja Program /Kegiatan
Semua Program belum ada yang memenuhi Target Kinerja dikarenakan pelaksanaan kegiatan masih sampai Triwulan II.
7. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah adalah:
 - Meningkatnya kualitas pelayanan di Kantor Kecamatan Trawas baik dalam PATEN maupun dari Bidang lainnya.
8. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak terpenuhinya target :
 - Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara Rutin terhadap semua Program / Kegiatan.
 - Melaksanakan semua kegiatan sesuai dengan Time Schedule yang telah ditetapkan sesuai Anggaran kas.

2.1. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto sebagai Lembaga Teknis Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto. maka kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan di Kabupaten Mojokerto. sehingga mendorong untuk turut serta mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mojokerto.

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dengan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten. dengan didukung sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan daerah kabupaten. Untuk mendukung terwujudnya perencanaan pembangunan daerah. dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto memiliki sasaran strategis

dan indikator kinerja sasaran yang telah disesuaikan dengan capain indikator Kepala Daerah pada Misi 7 sebagai berikut:

Tabel 2.3

Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Trawas Tahun 2023

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
			Nilai SAKIB Perangkat Daerah
			Rata-Rata Capaian Indikator Program :
			1. Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan
			2. Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti
		Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	Persentase Realisasi Perangkat daerah
			Indeks Profesionalisme ASN
			IKM Kecamatan
			Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan

Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah kabupaten diperlukan suatu tolak ukur kinerja. Tolak ukur kinerja ini didapat dari suatu penilaian yang sistimatik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan. Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto sesuai dengan Renstra Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto berdasarkan indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel 2.4 (T-C.30) sebagaimana berikut dibawah ini :

Tabel 2.4 (T-C. 30 Pada Lampiran Permendagri 2017)
Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Trawas
Kabupaten Mojokerto

NO	Indikator	SPM/ Stand art Nasio nal	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Proyeksi					Catatan Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2021	2023	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2023	2023	2024	2025	
				(n-2)	(n-1)	(n)	(n+1)	(n+1)	(n-2)	(n-1)	(n)	(n+1)	(n+1)	(n-2)	(n-1)	(n)	(n+1)	(n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10				11				12	
1	IKM Kecamatan	-	-	80	81	82	83	84	79	80.03	-	-	-	80	81	82	83	84	
2	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	-	-	61	62	63	64	55	57.66	56.29	-	-	-	61	62	63	64	55	
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	81	81.55	82.25	82.95	83.65	80.32	82.34	-	-	-	81	81.55	82.25	82.95	83.65	
4	Persentase Indikator Program Perangkat daerah yang tercapai sesuai target	-	-	81%	82%	83%	84%	85%	-	95.26 %	-	-	-	81%	82%	83%	84%	85%	
5	Persentase Realisasi Perangkat daerah	-	-	81%	82%	83%	84%	85%	-	91.84 %	-	-	-	81%	82%	83%	84%	85%	
6	IP ASN Perangkat Daerah	-	-	69	70	71	72	73	-	69.7	-	-	-	69	70	71	72	73	
7	Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai standar pelayanan	-	-	80%	81%	82%	83%	84%	65.03 %	97.41 %	-	-	-	80%	81%	82%	83%	84%	
8	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	-	-	81%	82%	83%	84%	85%	97.15 %	97.13 %	-	-	-	81%	82%	83%	84%	85%	
9	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	-	-	605 pelaya nan	630 pelaya nan	655 pelaya nan	680 pelaya nan	705 pelaya nan	1135 pelaya nan	1335 pelaya nan	-	-	-	605 pelaya nan	630 pelaya nan	655 pelaya nan	680 pelaya nan	705 pelaya nan	

10	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan. Pembangunan. ketentraman. ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. kesejahteraan masyarakat	-	-	23 Fasilita s	24 Fasilita si	24 Fasilita si	24 Fasilita si	24 Fasilita si	23 fasilita si	26 Fasilita si	-	-	-	23 Fasilita s	24 Fasilita si	24 Fasilita si	24 Fasilita si	24 Fasilita si	
----	---	---	---	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---	---	---	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--

2.3. Isu – Isu Penting

Kecamatan Trawas sebagai penyelenggara pelayanan publik sudah selayaknya menjadikan pelayanan publik sebagai sebuah isu strategis . karena menyangkut tentang kebutuhan dasar yang harus didapatkan oleh masyarakat. dan tujuan utama yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Berkaitan dengan permasalahan utama (*strategic issue*) serta isu-isu penting penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Trawas diantaranya dipengaruhi oleh kondisi internal dan kondisi eksternal kecamatan.

1.4.1 Kondisi Internal

Kondisi Internal Kecamatan dipengaruhi 2 (dua) faktor strategis yaitu faktor kekuatan dan faktor kelemahan organisasi yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Kecamatan Trawas.

A. Faktor Kekuatan Organisasi

1. Adanya dukungan dana dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang telah dituangkan dalam rencana kerja dan dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Trawas.
2. Penempatan SDM yang sesuai antara keahlian yang dimiliki dengan kebutuhan Organisasi
3. Adanya pembagian tugas yang jelas dari level camat sampai level pelaksana berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto.
4. Adanya sistem dan prosedur kerja yang jelas dan sudah tertuang dalam SOP yang dibakukan serta disosialisasikan.
5. Adanya dukungan teknologi informasi yang dapat mempercepat pelaksanaan tugas serta Sarana Prasarana yang memadai.
6. Adanya Optimalisasi kualitas pelayanan melalui pengembangan Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan dalam memberikan terobosan dalam memberikan Pelayanan yang Prima kepada masyarakat.

B. Faktor Kelemahan Organisasi

1. Kurang tertibnya sistem administrasi kepegawaian.
2. Adanya kekosongan Jabatan Struktural yang mempengaruhi kinerja OPD.
3. Kurang optimalnya sistem dan prosedur tata kearsipan.
4. Kualitas SDM aparatur yang dimiliki masih belum optimal .
5. Kurangnya pemahaman akan tupoksi yang dimilikinya
6. Adanya beban kerja yang tidak merata
7. Belum Optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan yang dikaitkan dengan dokumen dokumen perencanaan.

8. Kurangnya kualitas Dokumen Perencanaan
9. Belum optimalnya pemenuhan sarana-prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Trawas
10. Belum Optimalnya Reward and Punishment dalam mendukung kinerja ASN
11. Kurangnya Tenaga Administrasi Umum dalam membantu pelaksanaan tugas ASN dikarenakan keterbatasan jumlah ASN.
12. Kurang optimalnya pemeliharaan sarana prasarana pendukung pelayanan Publik
13. Belum optimalnya pengkoordinasian dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat daerah

1.4.2 Kondisi Eksternal

Kondisi eksternal Kecamatan juga dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor strategis yaitu Faktor Peluang Organisasi dan Faktor Tantangan Organisasi. karena berada diluar lingkungan kecamatan. maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Kecamatan Trawas dan membutuhkan koordinasi serta kerjasama dengan Instansi terkait. namun demikian keberadaan faktor eksternal dapat berpengaruh terhadap upaya peningkatan kinerja organisasi.

A. Faktor Peluang Organisasi

1. Letak Kecamatan Trawas yang berada di daerah Pegunungan dengan panorama yang Indah memberi dampak positif ke warga masyarakat dalam mengembangkan Daerah Trawas menjadi daerah Wisata yang bisa meningkatkan perekonomian warga Trawas dan menjadikan Trawas sebagai Daerah Tujuan Wisata.
2. Kondisi Wilayah Kecamatan Trawas termasuk daerah yang subur. sehingga merupakan daerah yang prospektif dan produktif untuk pengembangan kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan dan kegiatan lainnya.
3. Adanya perbaikan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Mojokerto seperti perbaikan jalan poros, jalan lingkungan dan jembatan serta penerangan jalan sangat berpengaruh terhadap kegiatan transportasi dan pengembangan sosial ekonomi masyarakat khususnya Wilayah Kecamatan Trawas ;
4. Keadaan masyarakat yang relatif kondusif sehingga mendukung pelaksanaan pembangunan dalam segala bentuk baik pembangunan fisik maupun mental spiritual.

B. Faktor Hambatan / Tantangan Organisasi

1. Perlunya Optimalisasi Pelayanan untuk memenuhi tuntutan masyarakat dalam kualitas Pelayanan Publik.
2. Perlunya mewujudkan Tata Kelola Birokrasi yang berintegritas akuntabel bersih dan transparan dalam mendukung peningkatan kualitas Pelayanan Publik .
3. Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintahan
4. Kurangnya kualitas tata kelola pemerintahan desa dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan desa.
5. Kurang optimalnya Fasilitas Pembangunan Desa dalam meningkatkan perekonomian Masyarakat Kecamatan Trawas
6. Kondisi Geografis Kecamatan Trawas yang menyebabkan letak desa - desa dengan jarak jangkauan yang jauh dan tersebar dari Kantor Kecamatan menyebabkan kurangnya koordinasi dan pemantauan wilayah di Lingkungan Kecamatan Trawas.
7. Kurang optimalnya Lembaga pemberdayaan di wilayah Kecamatan Trawas

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja utama Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dalam membangun kemandirian ekonomi dan sosial budaya yang berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. serta sinergitas program dengan Pemerintah Pusat. Proses penyusunan RKPD dilaksanakan melalui mekanisme/ tahapan yang diAkhiri dari Musrenbang Tingkat kelurahan. Kecamatan. Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kabupaten dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan yang memenuhi tiga prinsip yakni partisipatif. kesinambungan dan keseluruhan (Holistik)

Restrukturisasi Program/Kegiatan sebagaimana UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat dilaksanakan dalam perumusan program/kegiatan sebagaimana urusan dan kewenangan Organisasi Perangkat Daerah dalam undang-undang dimaksud dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Tahun 2024-2024 dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2024. Selengkapnya sebagaimana tabel 2.5 (T-C 31) berikut

Tabel 2.5 (T-C. 31 Dalam Permendagri 2017)
Reviw Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Mojokerto

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Trawas

N O	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Trawas	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,60 (A)	2.619.450.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Trawas	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,60 (A)	2.604.800.000	
	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Trawas	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	82%	15.000.000	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Trawas	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	82%	15.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Trawas	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	7.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Trawas	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	7.500.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Trawas	Jumlah Laporan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Laporan	7.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Trawas	Jumlah Laporan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Laporan	7.500.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Trawas	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	82%	2.135.051.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Trawas	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	82%	1.946.652.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Trawas	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	15 Orang/Bul an	2.135.051.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Trawas	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	15 Orang/Bul an	1.946.652.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Trawas	IP ASN Perangkat Daerah	70	17.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Trawas	IP ASN Perangkat Daerah	70	17.000.000	

	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Trawas	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	22 Orang	17.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Trawas	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	22 Orang	17.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Trawas	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	82%	179.850.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Trawas	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	82%	284.725.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Trawas	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	10.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Trawas	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	10.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Trawas	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	8 Paket	56.525.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Trawas	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	8 Paket	161.400.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Trawas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	40.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Trawas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	40.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Trawas	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket	9.725.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Trawas	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket	9.725.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Trawas	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	1 Dokumen	3.600.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Trawas	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	1 Dokumen	3.600.000	
	Penyediaan Bahan/Material	Kecamatan Trawas	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	12 paket	24.000.000	Penyediaan Bahan/Material	Kecamatan Trawas	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	12 paket	24.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Trawas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	36.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Trawas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	36.000.000	

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Trawas	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang dapat dicukupi	82%	30.500.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Trawas	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang dapat dicukupi	82%	44.170.000	
	Pengadaaan Mebel	Kecamatan Trawas	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	7 Paket	30.500.000			Jumlah Paket Mebel yang disediakan	8 Paket	44.170.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Trawas	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	82%	115.800.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Trawas	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	82%	115.800.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Trawas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	33.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Trawas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	33.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Trawas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	82.800.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Trawas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	82.800.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Trawas	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	82%	126.249.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Trawas	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	82%	181.453.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Trawas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	41.125.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Trawas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	41.125.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Trawas	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	3 unit	70.174.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Trawas	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	3 unit	115.228.000	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Trawas	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	12 unit	14.950.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Trawas	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	13 unit	25.100.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Trawas	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	0,82	37.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Trawas	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	0,82	37.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Trawas	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	630 pelayanan	37.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Trawas	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	630 pelayanan	37.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kecamatan Trawas	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada urusan Pemerintahan	19 Laporan	37.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kecamatan Trawas	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada urusan Pemerintahan	19 Laporan	37.000.000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Trawas	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	82%	318.500.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Trawas	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	82%	340.700.000	
	Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Trawas	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan. Pembangunan. ketentraman. ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. kesejahteraan masyarakat	32 fasilitasi	318.500.000	Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Trawas	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan. Pembangunan. ketentraman. ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. kesejahteraan masyarakat	32 fasilitasi	340.700.000	

	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Trawas	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 Dokumen	55.800.000	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Trawas	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 Dokumen	55.800.000	
	Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Trawas	Jumlah DokumenSinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5 Dokumen	43.300.000	Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Trawas	Jumlah DokumenSinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5 Dokumen	43.300.000	
	Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Trawas	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Dokumen	62.400.000	Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Trawas	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Dokumen	62.400.000	
	Fasilitas Pelaksanaan Tugas. Fungsi. dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Trawas	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas. Fungsi. dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	13 Dokumen	157.000.000	Fasilitas Pelaksanaan Tugas. Fungsi. dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Trawas	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas. Fungsi. dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	14 Dokumen	179.200.000	
JUMLAH					2.974.950.000	JUMLAH					2.982.500.000

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kecamatan merupakan sebuah OPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam hal pelayanan publik sehingga hampir semua kegiatan selalu berhubungan langsung kepada masyarakat baik melalui pembinaan pemerintah desa. Lembaga. organisasi maupun masyarakat untuk dapat mewujudkan visi dan misi kabupaten Mojokerto yang diemban oleh Kecamatan khususnya misi ke 3. Oleh sebab untuk menampung usulan dan kegiatan masyarakat yang ada dikecamatan Trawas melalui kegiatan Musrenbangdes dan Musrenbang Kecamatan. hasil dari dua kegiatan tersebut hanya berupa fisik prasarana. yang bentuk kegiatannya tidak dilakukan oleh Kecamatan Trawas secara langsung melainkan membantu untuk menampung dan menyampaikan kepada dinas terkait.

Tabel TC.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kabupaten Mojokerto

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Trawas

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Program : Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti		
	Kegiatan : Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah fasilitasi. rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Tugas. Fungsi. dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Desa Trawas Kecamatan Trawas	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas. Fungsi. dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1 Ekor Sapi	Hibah untuk Sapi Kurban

Sumber data : Kecamatan Trawas

Kegiatan Hibah Sapi Kurban diletakkan pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas. Fungsi. dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan dengan total pengajuan Anggaran untuk Sub Kegiatan tersebut adalah sebesar Rp. 157.000.000.00 dibawah Seksi Kemasyarakatan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan arah kebijakan nasional untuk lebih meningkatkan pelayanan umum pada semua masyarakat di semua lapisan maka semua program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Trawas ditujukan untuk meningkatkan nilai indeks pelayananan masyarakat (IKM) Kecamatan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Adapun tujuan Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto pada tahun 2023 adalah Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu pada Misi 3 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas. Akuntabel. Bersih. Transparan.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang diukur dengan jelas. terintegrasi. terkoordinasi dan konsisten yang akan dicapai dalam kurun waktu 2023 – 2026. Sasaran Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- 1. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah
- 2. Terwujudnya pelayanan publik yang optimal

Adapun target kinerja dari tujuan dan sasaran Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto pada 2022 – 2026 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1.
Target Kinerja Dari Tujuan Dan Sasaran

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN				
				2023	2023	2023	2025	2026
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai RB Perangkat Daerah Perangkat Daerah	61	62	63	64	65
			Nilai SAKIP	81.55	81.60	81.65	81.70	81.75
			Rata-rata capaian indikator program :	81%	82%	83%	84%	85%
			1 Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	81%	82%	83%	84%	85%
			2 Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	81%	82%	83%	84%	85%

			Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	81%	82%	83%	84%	85%
			Indeks Profesionalitas ASN	70	71	72	73	74
		Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	Nilai IKM	80	80.25	80.30	80.35	80.40
			Jumlah Inovasi yang Terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	2 inovasi	2 inovasi	2 inovasi	2 inovasi	2 inovasi

Adapun Cascading Kecamatan Trawas Tahun 2023 adalah sebagai berikut

3.3 Program dan Kegiatan

Rumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan Trawas Tahun 2023 mengacu pada Tujuan Kecamatan Trawas yang tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Trawas untuk 5 tahun mendatang yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan publik. Untuk itu Program dan kegiatan yang ada juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yaitu antara lain :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. dengan kegiatan indikatif:
 1. Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Evaluasi Kinerja Perangkat daerah
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasrkan Tugas dan Fungsi
 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - Penyediaan Bahan/Material
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaaan mebel
 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Prmrliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
- c. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
1. Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
 - Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

**REKAPITULASI DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN
PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2023**

KABUPATEN / KOTA : MOJOKERTO
 PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN TRAWAS

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target		Pagu Indikatif (Rp.)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2023	RANKHIR RKPD 2023	BERTAMBAH / BERKURANG
7					UNSUR KEWILAYAHAN						
7	1				KECAMATAN			2.974.950.000	2.982.500.000	7.550.000	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,60 (A)	81,60 (A)	2.619.450.000	2.604.800.000	-14.650.000
7	1	1	2.01		Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	82%	82%	15.000.000	15.000.000	0
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	7.500.000	7.500.000	0
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Laporan	21 Laporan	7.500.000	7.500.000	0
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	82%	82%	2.135.051.000	1.946.652.000	-188.399.000
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	15 Orang/Bulan	15 Orang/Bulan	2.135.051.000	1.946.652.000	-188.399.000
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	70	70	17.000.000	17.000.000	0
7	1	1	2.05	2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	22 Orang	22 Orang	17.000.000	17.000.000	0
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	82%	82%	179.850.000	284.725.000	104.875.000

7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	10.000.000	10.000.000	0
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	8 Paket	8 Paket	56.525.000	161.400.000	104.875.000
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	12 Paket	40.000.000	40.000.000	0
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket	2 Paket	9.725.000	9.725.000	0
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	3.600.000	3.600.000	0
7	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	12 paket	12 paket	24.000.000	24.000.000	0
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	36.000.000	36.000.000	0
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang dapat dicukupi	82%	82%	30.500.000	44.170.000	13.670.000
7	1	1	2.07	1	Pengadaaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	7 Paket	8 Paket	30.500.000	44.170.000	13.670.000
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	82%	82%	115.800.000	115.800.000	0
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	33.000.000	33.000.000	0
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	82.800.000	82.800.000	0
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	82%	82%	126.249.000	181.453.000	55.204.000
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	1 unit	41.125.000	41.125.000	0
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	3 unit	3 unit	70.174.000	115.228.000	45.054.000
7	1	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	12 unit	13 unit	14.950.000	25.100.000	10.150.000
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	0,82	0,82	37.000.000	37.000.000	0

7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	630 pelayanan	630 pelayanan	37.000.000	37.000.000	0
		2	4	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada urusan Pemerintahan	19 Laporan	19 Laporan	37.000.000	37.000.000	0
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	82%	82%	318.500.000	340.700.000	22.200.000
7	1	6	2.01		Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan. Pembangunan. ketentraman. ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. kesejahteraan masyarakat	32 fasilitasi	32 fasilitasi	318.500.000	340.700.000	22.200.000
7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 Dokumen	8 Dokumen	55.800.000	55.800.000	0
7	1	6	2.01	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah DokumenSinkronisa si Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5 Dokumen	5 Dokumen	43.300.000	43.300.000	0
7	1	6	2.01	1 1	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Dokumen	5 Dokumen	62.400.000	62.400.000	0
7	1	6	2.01	1 2	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas. Fungsi. dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas. Fungsi. dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	13 Dokumen	14 Dokumen	157.000.000	179.200.000	22.200.000
TOTAL									2.974.950.000	2.982.500.000	7.550.000

BAB IV

PENUTUP

A. Catatan Penting

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto Tahun 2022-2026. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Trawas Tahun 2023 ini harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut dilakukan guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Trawas, baik dalam kerangka regulasi, antara kegiatan satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses koordinasi antar pelaku pembangunan dibawah lingkup Kecamatan Trawas, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi, baik antar kegiatan, program maupun sektor.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dimanfaatkan antara lain melalui forum musyawarah koordinasi perencanaan, seperti Musrenbang ditingkat desa, Musrenbang Kecamatan ditingkat Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten ditingkat Kabupaten..

B. Kaidah – kaidah Pelaksanaan

Sehubungan dengan telah terbitnya Permendagri Nomor 86 tahun 2017, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Di dalam Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 sangat memerlukan waktu yang cukup panjang, dikarenakan harus menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Kecamatan Trawas Tahun 2023 Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
2. Rencana Kerja Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi Jawa Timur maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten Mojokerto, RPJMD Kabupaten Mojokerto, RKPD Kabupaten Mojokerto dan Renstra Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto.

C. Rencana Tindak lanjut

1. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks, upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
2. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga perlu menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang.
3. Menerapkan sistem *reward and punishment* terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.
4. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan OPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Untuk mewujudkan semua yang telah direncanakan dan dijabarkan dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Trawas diatas, dengan tekad mensukseskan pembangunan di Kabupaten Mojokerto serta adanya dukungan dari semua pihak, kami percaya dapat menyelesaikan tugas yang dibebankan di pundak kami. Sebagai manusia kami tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan, untuk itu sumbang saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan.

Mojokerto. Juli 2023
CAMAT TRAWAS

SUGONDO.S.Sos..MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670110 199003 1 007